



Judul : Masuk kawasan hutan: warga desa sulit bangun ekonomi
Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Masuk Kawasan Hutan Warga Desa Sulit Bangun Ekonomi

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan mendorong Pemerintah menata masyarakat desa yang wilayahnya dianggap masuk kawasan hutan. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat bisa membangun perekonomiannya secara berkelanjutan.

Legislator dari Fraksi PAN itu memberi contoh Desa Garung di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Desa Garung masih masuk dalam kawasan hutan, sehingga perlu penataan segera.

"Masih banyak desa, termasuk di Garung yang berada dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penataan dengan segera," kata Yohan, dalam keterangannya Jumat (10/10/2023).

Menurutnya, langkah itu sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penataan yang jelas, mereka tidak lagi dihantui ketidakpastian status lahan. Termasuk ketika berupaya mengembangkan potensi desa dan membangun perekonomian secara berkelanjutan.

Dia meminta penataan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diverifikasi agar statusnya bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Dengan demikian, lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta pengembangan ekonomi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan awal bagi kita un-

tuk ditindaklanjuti, agar sesegera mungkin persoalan-persoalan terkait dengan desa yang masuk dalam kawasan hutan ini bisa kita verifikasi," ungkapnya.

Yohan bilang, Presiden Prabowo Subianto juga telah mendorong Kalteng sebagai salah satu kawasan penting untuk penguatan swasembada pangan. Sampai hari ini perkembangan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kalteng cukup luar biasa, hampir 50 ribu hektare (ha).

Politikus asal Provinsi NTT itu menjelaskan, program CSR bukan hal yang sederhana seperti membalikkan telapak tangan. Proses itu membutuhkan waktu, tahapan, serta tata kelola air yang baik. Karena itu, pembangunan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberhasilan CSR.

Anggota Komisi IV DPR Edoardus Kaize menambahkan, langkah cepat dan terkoordinasi dalam penyelesaian status lahan desa di Kalteng jadi hal paling mendesak untuk dilakukan. Hingga kini, masih banyak desa yang terjebak dalam kawasan hutan produksi bahkan hutan lindung.

Dia menegaskan, persoalan legalitas lahan bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak hidup masyarakat desa yang telah lama menetap dan menggantungkan penghidupan di wilayah itu. Ia mencontohkan, jika kantor gubernur saja masih tercatat dalam kawasan hutan, tentu statusnya harus segera dikeluarkan. ■ TIF